

**Judul** : BKPM nggak mungkin menzalimi pengusaha  
**Tanggal** : Rabu, 14 September 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Satgas Investasi Cabut Ribuan IUP

# BKPM Nggak Mungkin Menzalimi Pengusaha

Senayan meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merilis daftar perusahaan yang telah dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya karena menyalahi aturan. Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi, setidaknya telah mencabut 2.078 IUP.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto berharap, ada penjelasan dasar atas tindakan itu. Sebab, banyak kalangan menilai pencabutan tersebut dilakukan tidak transparan dan sewenang-wenang.

"Saya tahu Pak Menteri (Bahlil Lahadalia, red) tidak mungkin menzalimi pengusaha, karena juga berlatar belakang pengusaha. Makanya Pak Menteri bisa lebih jelaskan lagi secara transparan supaya tidak menimbulkan gejolak di masa yang akan datang," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Darmadi bilang, setiap kebijakan yang berdampak kepada

pelaku usaha harus dilakukan transparan. Karena itu, ada baiknya jika Satgas Investasi menyerahkan *list* perusahaan apa saja yang telah dicabut dan dipulihkan IUP-nya beserta alasannya.

"Supaya tidak ada rahasia di antara kita, berapa banyak yang dicabut dan dipulihkan IUP-nya," tegasnya.

Darmadi juga meminta agar *list* perusahaan yang IUP-nya dicabut maupun dipulihkan, bisa segera diterima Komisi VI DPR.

Sudah menjadi tugas Komisi VI DPR untuk memastikan setiap kebijakan yang ditempuh



**Darmadi Durianto**

berdampak besar bagi perekonomian dalam negeri.

"Kami meminta *list* semua perusahaan itu disampaikan, dan ini masih dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami di Komisi VI," tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut,

Darmadi mengapresiasi kerja keras Kementerian Investasi/BKPM mendorong investasi dalam negeri. Sampai saat ini angkanya telah mencapai Rp 968,4 triliun.

Nilai tersebut terbilang cukup besar dan memberikan kontribusi 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Ini nomor dua setelah *consumer spending*. Kami berharap angka ini benar adanya, bukan angka sulapan," ujar Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan, Satgas Investasi telah mencabut 2.078 IUP. Dari pencabutan tersebut, terdapat 600 hingga 700 pelaku usaha yang mengajukan keberatan.

Bahlil bilang, Presiden Jokowi memerintahkan kalau ada IUP-IUP yang melanggar peraturan agar dilakukan pembaharuan dan perbaikan dalam rangka rasa keadilan.

Hal ini berlaku buat IUP digai-

daikan ke bank, hanya dipakai untuk dijual kembali, ditaruh di pasar saham.

"Uangnya ada, tapi tidak dibangun untuk peruntukkan tambang tersebut. Maka dipertimbangkan untuk dilakukan pembaharuan," jelas Bahlil.

Satgas Investasi, lanjut dia, tentu memberikan ruang bagi pelaku usaha yang keberatan dengan pencabutan IUP tersebut. Namun, setiap keberatan akan dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh tim Satgas.

Jika ditemukan ada kelalaian dari pihak Pemerintah atas pencabutan IUP tersebut, pihaknya akan mengembalikannya.

Pada tahap pertama, pihaknya sudah mengembalikan 80 IUP setelah diverifikasi layak dan sesuai aturan.

"Kalau yang belum, kemungkinan antara dua. Masuk pada tahap kedua atau tidak memenuhi syarat. Dan kami tidak pernah pilih kasih," tegasnya. ■ KAL